





Dari pemahaman ayat tersebut ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 19 disebutkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Pada Pasal 21 disebutkan pula wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan. Kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Ini memperjelas bahwasanya hubungan nasab sangat berpengaruh terhadap perwalian dimana seseorang yang memiliki nasab terdekat dengan calon mempelai wanita, dialah yang berhak untuk menjadi walinya.

Dalam hal status nasab anak zina ada perbedaan pendapat diantara tokoh masyarakat Desa Tegalsari. Pendapat pertama dari Ustadz Ali Maksud dan Ustadz H. Zainal Abidin, menyatakan bahwa anak zina terputus nasabnya dengan ayah biologisnya, serta halal bagi ayah biologis menikahi anak zinanya. Pendapat kedua dari Ustadz H. Moh. Sohib dan Ustadz Abdul Afif, menyatakan bahwa anak zina tersebut nasabnya tetap kepada ayah biologisnya dengan syarat ayah biologis tersebut menikahi wanita yang dihamili sebelum usia kandungan 3 bulan dan anak yang dikandungnya lahir tidak kurang dari waktu 6 bulan setelah pernikahan. Pendapat kedua ini selaras dengan pendapat imam Hanafi bahwa nasab anak luar nikah kepada bapak biologisnya adalah tetap, karena secara hakiki anak luar nikah tersebut tetap merupakan anaknya, atau dengan kata lain





dengan hukum Islam. Sedangkan dalam pendapat yang kedua dari Ustadz H. Moh. Shohib dan Ustadz Abdul Afif merasa setuju dengan lahirnya putusan tersebut. Karena dengan adanya putusan tersebut seorang anak tidak akan kehilangan hak-haknya yang seharusnya didapatkan.

Dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memunculkan berbagai implikasi khususnya kedudukan anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut seperti dua sisi mata uang. Di satu sisi melindungi hak-hak anak luar kawin, karena dengan putusan tersebut anak luar kawin mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dan perwalian dari ayah biologisnya. Akan tetapi di sisi lain, putusan tersebut terkesan melemahkan fungsi dan menyebabkan lembaga perkawinan menjadi kurang relevan.

Dengan adanya terobosan hukum ini memberikan kesempatan kepada setiap anak luar kawin tanpa terkecuali untuk mengakses apa yang menjadi hak keperdataannya sebagai warga Negara, baik jalur pembuktian dipersidangan atau serangkaian pembuktian lainnya seperti melalui tes DNA atau yang lainnya. Hal tersebut mengingat tidak berdosanya seorang anak yang lahir sehingga pada dasarnya tidak ada alasan bagi Negara dalam hal ini menjegal apa yang menjadi haknya sebagai warga Negara.

Menanggapi adanya perbedaan pendapat diantara para tokoh masyarakat Desa Tegalsari penulis berpendapat bahwa nasab anak zina terputus dari sisi bapak dan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Karena Nabi Muhammad SAW. bersabda :







